

## RINGKASAN

**JUWITA RAMAINI NIM 210210304** **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014**  
**(Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp)**  
**(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. dan Dr. Mukhlis, S.H., M.H.)**

Tindak pidana persetujuan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sementara di Aceh juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah. Namun, penegakan hukum masih terdapat perbedaan penerapan aturan, khususnya ketika pelaku dan korban sama-sama anak, sebagaimana dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp yang menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak meskipun peristiwa terjadi di wilayah Aceh yang memiliki Qanun Jinayah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam penerapan hukum sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan yuridis dalam penanganan perkara persetujuan yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetujuan dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp serta mengkaji sistem penghukuman terhadap delik persetujuan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum kepada korban anak terhadap tindak pidana persetujuan dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp dilakukan melalui penerapan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan kepada pelaku, namun perlindungan tersebut belum optimal karena masih terdapat kelemahan seperti penyebutan identitas korban dalam putusan dan tidak adanya pemberian restitusi. Sistem penghukuman delik persetujuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menunjukkan adanya perbedaan pengaturan sanksi, dimana Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan pidana penjara serta perlindungan dan pemulihan bagi korban, sedangkan Qanun Aceh mengatur sanksi jarimah zina berupa hukuman cambuk.

Disarankan agar aparat penegak hukum lebih konsisten menjaga kerahasiaan identitas anak korban serta mengoptimalkan pemberian restitusi, sekaligus memperkuat sinkronisasi pengaturan sanksi guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak korban.

**Kata Kunci : Perlindungan Anak, Tindak Pidana Persetujuan.**

## SUMMARY

**JUWITA RAMAINI** A LEGAL REVIEW OF CHILD-ON SEXUAL  
NIM 210210304 ACTIONS UNDER LAW NUMBER 35 OF 2014 AND  
ACEH QANUN NUMBER 6 OF 2014  
(Study of Decision Number: 8/Pid.Sus-  
Anak/2020/PN.Ksp)  
(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. and Dr. Mukhlis,  
S.H., M.H.)

*The criminal act of sexual intercourse against children is regulated under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, while in Aceh it is also regulated under Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. However, law enforcement still shows differences in the application of these regulations, particularly when both the perpetrator and the victim are children, as seen in Decision Number 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp which applied the Child Protection Law even though the incident occurred in Aceh where the Jinayat Qanun is in force. This situation indicates a lack of synchronization in the application of the law, raising questions regarding the juridical considerations in handling cases of sexual intercourse committed by children.*

*This study aims to explain the form of legal protection for child victims of sexual intercourse in Decision Number 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp and to examine the punishment system for the offense of sexual intercourse based on the Child Protection Law and Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law.*

*This research uses a normative juridical method with statutory and comparative approaches. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research.*

*The results of this study indicate that legal protection for child victims of sexual intercourse in Decision Number: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp was implemented through the application of the Child Protection Law by imposing a sentence of 3 years imprisonment and 3 months of job training on the perpetrator. However, this protection has not been fully optimal due to weaknesses such as the disclosure of the victim's identity in the decision and the absence of restitution for the victim. The punishment system for the offense of sexual intercourse under Law Number 35 of 2014 and Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law shows differences in sanction arrangements, where the Child Protection Law emphasizes imprisonment as well as protection and recovery for victims, while the Aceh Qanun regulates the offense as jarimah zina with caning punishment.*

*It is recommended that law enforcement officials consistently protect the confidentiality of child victims' identities and optimize the provision of restitution, while also strengthening the synchronization of sanction regulations to ensure more effective legal protection for child victims.*

**Keywords: Child Protection, Crime of Sexual Intercourse.**